

ABSTRAK

Penerapan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana korporasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korporasi dan sanksinya, Subyek hukum korporasi adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam beberapa pasal yang sama tidak dibedakan baik pasal mengenai pribadi atau korporasi akan tetapi tidak digeneralisir sehingga korporasi dikenakan ancaman penerapan sanksi yang berbeda dengan pribadi.

Sementara mengenai definisi yang dimaksudkan dengan korporasi tidak dirumuskan secara *limitatif*, hal itu untuk membuka wacana dan pendapat para praktisi hukum agar menafsirkan korporasi secara luas, terbuka dan *progresif*.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang meluluh lantakan dimana saat ini belum berkeadilan, kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi saat ini dan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang berbasis nilai keadilan bagi masyarakat korban.

Metode Penelitian Disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga hasil temuan yang berlaku sekarang dan dapat direkonstruksi untuk diterapkan pada masa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dakwaan yang berbeda dengan beberapa yuridiksi pengadilan yang berbeda. Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana korporasi dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan, khususnya masyarakat korban.

Sehingga Rekonstruksinya Integral disamping dikenakan Pasal 372, 374 dan Pasal 378 KUHP termasuk Pasal 55 dan 56 KUHP, juga Pasal 1328, 1243, 1365 KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 20010 tentang TPPU, juga UU Perlindungan Konsumen dan dipertegas dengan UU PKPU dan PAILIT Pasal 229 ayat 3 dan 4

Dengan belum terakomodasinya didalam Undang-Undang, maka intensitas kejahatan korporasi semakin meningkat. Oleh karena, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan para pelaku karena tidak diatur secara tegas dengan dakwaan dan pasal yang sama dan berlapis sehingga berbeda tuntutananya.

Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan sanksi denda, ditambah ganti rugi kepada masyarakat korban karena melakukan kejahatan yang *konstruktif* serta sanksi pelarangan bisnis sejenis dengan sanksi seumur hidup dan masuk kategori DOT.

Hal ini sebagaimana Perma No. 13 Tahun 2016 dimana tindak pidana korporasi sanksinya adalah Pidana Pokok ditambah Pidana Tambahan dalam bentuk Ganti Rugi untuk menjukkan rasa keadilan.

Kebijakan formulasi tindak pidana korporasi yang akan datang diharapkan memuat secara terbuka sanksi pidana yang dirumuskan secara terbuka, komulatif dan alternatif, objeknya jelas dan sanksinya keras khususnya subyek hukum tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif, konstruktif sistematis dan terintegrasi sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum baik korporasi maupun masyarakat khususnya korban.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Tindak Pidana, Korporasi.

ABSTRACT

Application of Criminal Law in overcoming corporate crime, this is intended to identify and analyze the policy formulation of corporate crime and its sanctions. regarding individuals or corporations but not generalized so that corporations are subject to the threat of applying different sanctions from individuals.

Meanwhile, the definition of what is meant by corporation is not formulated in a limitative manner, it is to open discourses and opinions of legal practitioners in order to interpret the corporation in a broad, open and progressive manner.

The purpose of this research is to analyze criminal sanctions against perpetrators of corporate criminal acts who commit blasphemies where currently there is no justice, the weaknesses of criminal sanctions against current corporate criminal offenders and the reconstruction of criminal sanctions against perpetrators of corporate crime based on the value of justice for the victim community. .

Research Methods This dissertation uses a sociological juridical approach so that the findings are applicable now and can be reconstructed to be applied in the future.

The results showed that there were several different charges with different court jurisdictions. Criminal fines for corporations are not equipped with special rules. It is felt that the policy on the application of the formulation of corporate crime and the application of sanctions does not fulfill the aspects of certainty and justice, especially the victim community.

So that the reconstruction is integral besides being subject to Articles 372, 374 and Article 378 of the Criminal Code including Articles 55 and 56 of the Criminal Code, as well as Articles 1328, 1243, 1365 of the Civil Code, Law no. 8 of 2010 concerning TPPU, as well as the Consumer Protection Law and reinforced by the PKPU and PAILIT Law Article 229 paragraphs 3 and 4

By not being accommodated in the Law, the intensity of corporate crime will increase. Therefore, this is a legal loophole that the perpetrators can exploit because it is not strictly regulated by the same and layered charges and articles so that the charges are different.

The criminal sanctions imposed are cumulative criminal sanctions, the main punishment is imprisonment and fines, plus compensation to the community of victims for committing constructive crimes as well as sanctions prohibiting similar businesses with a life sentence and categorized as DOT.

This is as Perma No. 13 of 2016, where the sanctions for corporate crimes are the main crime plus additional punishment in the form of compensation to show a sense of justice.

The future formulation policy for corporate criminal acts is expected to contain openly formulated criminal sanctions that are open, cumulative and alternative, the object is clear and the sanctions are harsh, especially the subject of criminal law which is formulated in comprehensive, constructive systematic and integrated articles as a form of protection and legal certainty for both corporations and society, especially victims.

Keywords: Reconstruction, Crime, Corporation